LAPORAN KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI TAHUN 2019



Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian

DAFTAR ISI

DAF	TAR ISI	ii
I. C	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
A.	Kebijakan	1
В.	Sarana dan Prasarana	2
C.	Kondsi Sumberdaya Pengelola	2
D.	Anggaran	2
II. (Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
A.	Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik	2
В.	Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik	3
C.	Kegiatan Yang diikuti	4
III. K	Kendala Internal dan Eksternal	4
IV. E	Evaluasi	4
V. F	Penutup	5
Lam	piran	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maklumat Pelayanan	1
Gambar 2. Pojok Layanan İnformasi Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi	
Gambar 3. Statistik Dokumen Informasi Publik yang diunggah ke portal PPID Balai	
Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.	3

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua UK/UPT, tak terkecuali di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Nomor: 40/Kpts/OT.050/H.8.3/01/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Balai Penelitian Agroklimat terlaksana dengan baik dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

B. Maklumat Pelayanan Publik

Maklumat pelayanan publik Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi terdapat di Lobby Kantor dan juga di Website Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

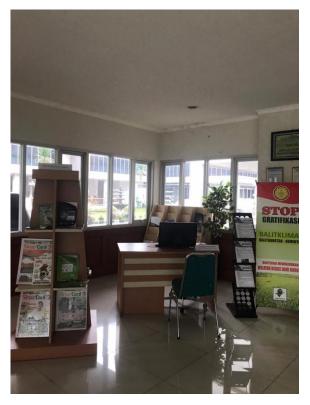


MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU"

C. Sarana dan Prasarana

PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi telah memiliki tempat layanan informasi tersendiri yang digunakan untuk pelayanan informasi publik.



Gambar 2. Pojok Layanan Informasi Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi

D. Kondisi Sumberdaya Pengelola

PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi belum memiliki petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*) yaitu Kepala Sie Jasa Penelitian.

E. Anggaran

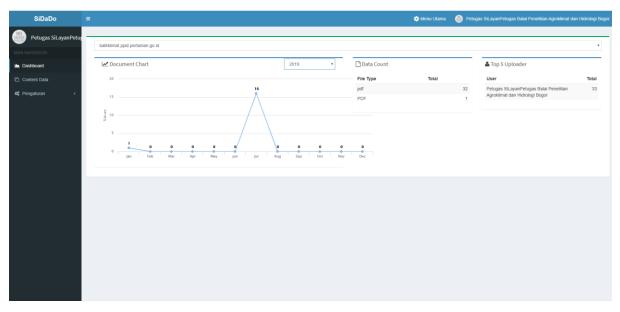
Karena tidak adanya petugas khusus untuk PPID, hal tersebut mendasari tidak adanya alokasi anggaran khusus bagi PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik

Pengumpulan dokumen informasi publik yang ada di lingkup Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi didapat dari Sie Pelayanan Teknik.

Semua dokumen informasi publik yang sudah terkumpul kemudian di unggah di portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi dengan alamat balitklimat.ppid.pertanian.go.id. Pada tahun 2019 terdapat 17 Dokumen yang diunggah di portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.



Gambar 3. Statistik Dokumen Informasi Publik yang diunggah ke portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

B. Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Keterangan
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	0	
5	Mei	0	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	0	
12	Desember	0	

Selama Tahun 2019 belum ada permintaan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

C. Kegiatan Yang diikuti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diikuti beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2019 antara lain:

- 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID Lingkup Kementerian Pertanian, pada tanggal 8-9 Juli 2019 bertempat di Bogor
- 2. Rapat Koordinasi PPID 2019 Lingkup Kementerian Pertanian, pada tanggal 1 Oktober 2019 bertempat di Depok.

III.Kendala Internal dan Eksternal

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu sosialisasi secara terus menerus tentang Kepmentan yang berisi informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen—dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkup Kementerian Pertanian.

IV. Evaluasi

Dalam rangka perbaikan pengelolaan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi ke depan disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana terkait Pelayanan Informasi, Pengalokasian anggaran secara khusus untuk pengelolaan informasi publik, melakukan kegiatan antara lain sosialisasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana, peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia PPID, dan menyusun informasi publik untuk dilayankan kepada publik.

Sosialisasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana perlu dilakukan agar pegawai yang terlibat dalam pengelolaan PPID dapat lebih memahami lingkup pelayanan

PPID, mekanisme pelayanan, dan pengelolaan PPID secara umum. Peningkatan kompetensi dan kemampuan diberikan dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis agar sumber daya manusia PPID memahami strategi pelayanan, informasi yang boleh dan yang tidak boleh diberikan, memahami peraturan yang terkait dengan informasi publik, dan penanganan sengketa informasi.

V. Penutup

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

Bogor, 31 Desember 2018

Kepala Sie Jasa Penelitian Selaku PPID Pelaksana Balitklimat

Anggri Hervani, SP, M.Sc NIP. 19840331 200912 1 003

Lampiran

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID Lingkup Kementerian Pertanian



2. Rapat Koordinasi PPID 2019 Lingkup Kementerian Pertanian



3. Portal PPID Balitklimat

